

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN MAHKOTA II DI KOTA SAMARINDA

Sinta Hariyati¹

Abstrak

Sinta Hariyati, 1102025129. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda”, di bawah bimbingan Dr.Rita Kala Linggi, M.Si selaku pembimbing I, dan Budiman, S.IP,M.Si selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai proses pelaksanaan pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda, proses pelaksanaan pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda, untuk mengetahui tanggapan – tanggapan masyarakat mengenai proses pelaksanaan pembangunan dan untuk mengetahui dampak positif dan negative yang akan ditimbulkan dalam pembangunan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan key informan dan informan, serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jembatan Mahkota II yang direncanakan pada tahun 2003 sampai sekarang masih belum selesai. Proses pembangunan jembatan, secara umum masyarakat beranggapan bahwa proses pembangunan berjalan begitu lambat sehingga pembangunan belum kunjung selesai hingga sekarang. Dalam pembangunan jembatan ada 2 (dua) dampak positif dan negatif yaitu dampak positif menurut masyarakat bahwa pembangunan memberikan kemudahan dalam hal Aksesibilitas pada jalur lalu lintas bagi masyarakat, sedangkan pada dampak negatifnya yaitu berkurangnya pendapatan pada pengguna transportasi air dan mengganggu aktivitas masyarakat saat kegiatan proyek berjalan. Selanjutnya faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan jembatan adalah, Faktor personal atau situasional yaitu masyarakat dapat melihat kondisi atau keadaan pembangunan jembatan masih 70 % dari bentuk sempurna sedangkan faktor fungsional dapat dilihat pembangunan jembatan yang belum selesai sehingga belum dapat digunakan sebagai akses jalur lalu lintas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Proses Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sintahariyati@gmail.com

Pendahuluan

Pertumbuhan kota yang cukup tinggi membawa dampak dalam berbagai bidang kehidupan, tidak hanya terbatas pada masalah fisik saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kota sebagai lingkungan kehidupan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang melalui dua macam proses yaitu proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya dan proses perubahan yang dibentuk, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota. Undang-Undang yang memuat tentang tata ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 968/524/HK-KS/VII/2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak (Multiyers Contact) Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda, bahwa sehubungan kegiatan pembangunan jembatan Mahkota II tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, maka dalam upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan fasilitas infrastruktur kota untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (multiyers contract) berdasarkan Surat dari Wali Kota Samarinda.

Kota Samarinda sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Timur mempunyai peran utama dalam pembangunan wilayah, terutama sekali untuk pengembangan provinsi. Kota Samarinda terbagi menjadi dua oleh Sungai Mahakam, yaitu bagian Selatan yang sebagian besar merupakan areal terbuka dan pemukiman yang belum berkembang sumber daya alamnya, dan bagian utara merupakan pusat kota dan sentra bisnis Kota Samarinda. Pada saat ini, kedua wilayah tersebut hanya terhubung dengan satu jembatan saja, yaitu jembatan Mahakam II yang dibangun pada tahun 1986, terletak dibagian Barat Kota Samarinda.

Kurangnya Prasarana transportasi yang menghubungkan dua wilayah kota tersebut menimbulkan hambatan dalam mengembangkan wilayah bagian Selatan Kota Samarinda, disisi lain terdapat indikasi ketidak mampuan jembatan Mahakam I untuk menampung lalu lintas yang semakin meningkat jembatan mahakam I juga digunakan untuk lalu lintas antar kota karena jembatan tersebut merupakan satu - satunya jembatan dalam jaringan jalan Trans Kalimantan bagian Timur dan berfungsi menghubungkan kota – kota besar di Kalimantan Timur.

Masyarakat merupakan komponen yang paling penting untuk mewujudkan tujuan pemerintah dengan berbagai aturan ataupun tata cara yang berbeda-beda. Beragamnya masyarakat dengan keperluannya dan menghadapinya dengan sifat dan watak yang berbeda akan banyak menimbulkan pendapat/persepsi seiring banyaknya peraturan yang harus dijalani untuk mewujudkan suatu tujuan pemerintah yang baik. Dengan adanya persepsi-persepsi dari masyarakat dengan berbagai sikap dan watak, kita dapat melihat seberapa besar respon masyarakat terhadap suatu aturan yang berlaku. Adapun dari sekian banyak persepsi dari masyarakat tersebut akan membuat kita

Persepsi Masyarakat Terhadap pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda (Sinta H) menarik kesimpulan seberapa besar yang responnya setuju terhadap aturan tersebut dan seberapa besar yang responnya kurang setuju atau sama sekali tidak setuju.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda? dan *Kedua*, factor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat ??

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealu dan Prewit dalam Nawawi (2009:6) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun menaatinya. Timtuss dalam Nawawi (2009:6) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Bentuk Kebijakan Publik

Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden.
- e. Peraturan Daerah.

Namun demikian, secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan yang disebut di atas.
- 2) Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.
- 3) Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya.

Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang

bertujuan mendistribusi sumber daya negara dan bertujuan menyerap sumber daya negara. Jadi, pemahaman yang pertama adalah distributif versus absortif. Kebijakan distributif murni misalnya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan dari daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah sumber daya.

Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dapat lebih mudah dipahami jika dikaji tahap demi tahap. Inilah yang menjadikan kebijakaan publik menjadi “penuh warna”, dan kajiannya amat dinamis. Berbicara mengenai proses kebijakan public.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Forecasting (Peramalan)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan.

Rekomendasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

Monitoring Kebijakan

Memberikan informasi yang mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

Evaluasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki dimensi yang sangat luas dari mulai identifikasi masalah publik, desain program atau kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan hingga evaluasi kebijakan.

Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Persepsi

Menurut Walgito (2003:70) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berperan dalam persepsi antara lain, yaitu :

- a. Objek yang dipersepsi
- b. Alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf
- c. Perhatian, yaitu merupakan pemusatan atau konsentrasi dariseluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Menurut Rakhmat (2003:51) Persepsi ditentukan oleh beberapa faktor yang dapat menimbulkan adanya persepsi, yaitu :

a. Faktor Personal dan Faktor Situasional

Faktor personal dan faktor yang sangat mempengaruhi persepsi adalah perhatian. Menurut Andersen (dalam Jalaluddin Rakhmat (2003:52)) perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Dimana perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita, dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain.

b. faktor Fungsional

Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor personal. Dimana yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu.

Menurut pendapat Krech dan Crutchfield (dalam Jalaluddin Rakhmat (2003:56) merumuskan dalil persepsi yang pertama : bahwa persepsi bersifat selektif secara fungsional, yang artinya bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Contohnya; pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi.

c. Faktor Struktural

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan fisik-fisik saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Faktor Struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus di isi serta kemudahan untuk memperolehnya.

Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Walgito (2003:71) menyatakan bahwa proses terjadinya persepsi bila objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau perseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kedalaman dan proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak. Proses ini disebut sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi inilah yang disebut sebagai proses psikologis.

Objek Persepsi

Menurut Walgito (2003 : 76) bahwa objek yang dapat dipersepsi sangatlah banyak, yaitu segala sesuatu yang ada disekitar manusia dan manusia sendiri pun dapat menjadi objek persepsi. Karena sangat banyaknya objek yang dapat dipersepsi. Jadi objek persepsi, yaitu manusia yang dipersepsi, lingkungan yang

melatarbelakangi objek persepsi, dan perseptor sendiri akan menentukan persepsi.

Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu usaha yang untuk memperbaiki pada kondisi yang lebih baik bagi suatu masyarakat untuk menuju ke arah kemajuan. Maju mundurnya suatu masyarakat dapat dilihat dari hasil – hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Pembangunan fisik belum dapat dijadikan sebagai suatu jaminan bahwa masyarakatnya sudah maju, demikian pula sebaliknya kemajuan suatu masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Pembangunan yang terpadu dari berbagai bidang akan lebih menguntungkan dibandingkan pembangunan yang dilaksanakan secara sektoral. Menurut Bintoro Tjorkroamidjojo (2002 : 20), pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa ini.

Dampak Positif dan Negatif Pembangunan

Dampak menurut Waralah Rd Cristo (2008 : 12) adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.

Menurut Hikmah Arif (2009 : 10) Pengertian Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya ‘Sesuatu’. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya ‘Sesuatu’. Dampak negatif pembangunan tersebut tidak selalu di sadari dan atau tidak selalu tampak ke permukaan, masalah singkat ini akan membicarakan cara menganalisis dampak sosial pembangunan dan setelah itu akan perhatikan serius dalam kajian dampak pembangunan.

Menurut Afrizal (2007 : 10), Ketika berbicara dampak pembangunan kita berbicara akibat – akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan, dampak tersebut terdiri dari :

- a. Dampak positif. Dampak yang dianggap baik oleh penyelenggaraan pembangunan merupakan orang lain.
- b. Dampak negatif. Dampak yang dianggap tidak baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain.
- c. Dampak yang disadari (intended consequences). Dampak yang direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. Dampak ini adalah dampak yang diketahui dan disadari akan terjadi. Dalam kepustakaan sosiologi, hal seperti itu tersebut sebagai fungsi manifes. Dampak yang disadari pada dasarnya tergolong dampak positif paling kurang menurut pandangan penyelenggara pembangunan, dampak seperti ini biasanya mudah diketahui karena disadari

keberadaannya atau sering telah ditulis oleh penyelenggara pembangunan dalam proposal pembangunannya. Melakukan wawancara dengan pembuat proposal atau membaca proposal itu sendiri cukup untuk mengetahui hal tersebut.

- d. Dampak yang tidak dsadari (Unintended consequences). Dampak yang tidak direncanakan oleh penyelenggara pembangunan, oleh sebab itu, dampak ini adalah dampak yang tidak diketahui dan tidak disadari. Hal dalam kepustakaan sosial disebut sebagai fungsi laten, dampak seperti ini biasanya sulit diketahui karena tidak disadari atau tidak pernah dapat ditemukan dalam proposal pembangunan oleh penyelenggara pembangunan. Dampak yang disadari sering tergolong dampak negatif.

Masyarakat

Shadily (1993 : 47) menyatakan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan menurut Hendropuspito (1989 : 73) bahwa masyarakat itu merupakan kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup didaerah tertentu dan bekerjasama untuk mencapai kepentingan yang sama pula. Dari beberapa pendapat diatas jadi dapat disimpulkan bahwa “persepsi masyarakat merupakan suatu cara pandang dari masyarakat mengenai bagaimana masyarakat tersebut mengartikan dan menilai segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengalaman tentang objek-objek, peristiwa, hubungan - hubungan tertentu melalui penginderaan terlebih dahulu”.

Defnisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah tahapan dalam memberi batasan mengenai suatu istilah yang di perlukan dalam penelitian. Pembatasan pengertian tersebut akan mempermudah penulis dalam pemahaman dan juga untuk menghindari adanya sebuah penafsiran dari apa yang di inginkan serta untuk membatasi lingkup penulisan.

Persepsi Masyarakat adalah Tanggapan, pendapat atau respon yang datang dan bersumber dari masyarakat yang beragam tentang adanya kebijakan pembangunan jembatan Mahkota II yang meliputi proses, dampak dan faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda.

Metodelogi Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memaparkan suatu situasi atau kejadian. Moelong (2006:11) mengemukakan bahwa, deskriptif adalah data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini di jelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara,

catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering di tanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa di manfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Proses Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda

Proses pembangunan jembatan Mahkota II di rencanakan pada tahun 2002 dan dilaksanakan pada tahun 2003 dengan Anggaran sekitar Rp.600 Miliar dari APBD tingkat II dan disubsidikan dari APBD tingkat I. Proses pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, tetapi sampai sekarang pembangunan jembatan masih belum dapat digunakan untuk Aksesibilitas masyarakat dan dalam proses pembangunannya masih jauh dari kata sempurna. Tanggapan masyarakat terhadap proses pembangunan jembatan Mahkota II, pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda yang berjalan hampir 11 tahun hingga sekarang masih belum selesai, hal ini terlihat dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat beranggapan Pemerintah Kota Samarinda masih kurang maksimal dan serius dalam melaksanakan program pemerintah dikarenakan proses yang sudah ditetapkan masih belum dilaksanakan dengan baik. Seandainya Pemerintah Kota serius untuk pembangunan jembatan Mahkota II di proses yang dilakukan sesuai dengan prosedur, seharusnya pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda dapat digunakan masyarakat saat ini sebagai Akses bagi pengguna transportasi darat. Disini peran dari Pemerintah Kota Samarinda perlu lebih dioptialkan lagi karena kalau sudah selesai masyarakat Samarinda Ilir dan Palaran apabila ke Samarinda Kota dapat menggunakan jembatan Mahkota II ini. Pemerintah Kota perlu lebih serius dan lebih giat lagi dalam melaksanakan pembangunan.

Selain itu masyarakat masih menganggap Pemerintah Kota kurang efektif dalam menyelesaikan pembangunan jembatan. Pemerintah Kota dianggap masih kurang maksimal dalam mengelolah pembangunan jembatan di Kota Samarinda sehingga pembangunan jembatan hingga sekarang masih belum selesai dan berjalan begitu lambat. Disini jelas perlu adanya pengawasan dari Pemerintah Kota Samarinda untuk lebih serius dalam proses pembangunan.

Dampak Positif dan Negatif yang akan di timbulkan Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda.

Dampak yang ditimbulkan pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan pembangunan jembatan Mahkota II banyak memberikan dampak positif terhadap Aksesibilitas jalur lalu lintas bagi masyarakat yaitu mempermudah dan mempersingkat jalur lalu lintas, menjadikan daerah menjadi rame dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk kesempatan kejar dan berusaha. Adapun dampak negatifnya yang ditimbulkan pada proses pembangunan tersebut yaitu masih adanya gangguan pada pencemaran udara dan kebisingan yang mengganggu aktivitas masyarakat, dan adapun dampak lainnya yaitu berkurangnya pendapatan bagi warga pengguna transportasi air. Disini terlihat jelas bahwa sepertinya pemerintah seolah masih kurang memperhatikan masyarakat pengguna transportasi air melainkan hanya memperhatikan dampak pada penggunaan transportasi darat sebagai Aksesibilitas jalur lalu lintas.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

1. Faktor Personal atau Situasional

Munculnya persepsi masyarakat dengan dipengaruhi oleh factor situasional yaitu dengan melihat pembangunan yang belum selesai secara sempurna. Tidak terselesaikan dan berjalan begitu lambat pembangunan jembatan, memunculkan persepsi masyarakat dari factor personal atau situasional, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang masyarakat dengan melihat kondisi pembangunan jembatan masih sekitar 70% dari bentuk sempurna.

2. Faktor Fungsional

Munculnya persepsi masyarakat terhadap pembangunan. dimana masyarakat berharap pembangunan menjadi akses, tetapi sekarang masyarakat masih menggunakan transportasi air dan masyarakatpun masih mutar lagi lewat jembatan Mahakam I untuk menyebrang. Dilihat dari berbagai pandangan masyarakat mengenai pembangunan jembatan yang sampai sekarang belum menjadi Aksesibilitas masyarakat dikarenakan keadaan pembangunan jembatan dan fungsi pembangunan yang masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat terhadap proses pembangunan jembatan, secara umum masyarakat beranggapan bahwa proses pembangunan berjalan begitu lambat sehingga pembangunan belum kunjung selesai hingga sekarang. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota kurang serius dan maksimal dalam melaksanakan proses pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda.
2. Secara umum masyarakat menganggap terdapat 2 (dua) dampak dari pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda menimbulkan persepsi masyarakat mengenai dampak positif dan negative. Dampak positif menurut masyarakat bahwa pembangunan memberikan kemudahan dalam hal Aksesibilitas pada jalur lalu lintas bagi masyarakat, sedangkan pada dampak negatifnya yaitu berkurangnya pendapatan pada pengguna transportasi air dan mengganggu aktivitas masyarakat saat kegiatan proyek berjalan.
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan jembatan Mahkota II di Kota Samarinda adalah factor personal atau situasional dan factor fungsional. Faktor personal atau situasional yaitu masyarakat melihat kondisi atau keadaan pembangunan jembatan masih 70% dari bentuk sempurna sedangkan factor fungsional dapat lihat pembangunan jembatan yang belum selesai sehingga pembangunan belum dapat digunakan sebagai akses jalur lalu lintas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saran

1. Dalam proses pembangunan jembatan Mahkota II, diharapkan Pemerintah Kota Samarinda menggunakan sistem terbuka dimana setiap perencanaan, proses pembangunan dan prosedur kegiatan proyek pembangunan harus diketahui oleh public, karena hal ini akan mengundang persepsi masyarakat secara luas, supaya tidak adanya bentuk kekecewaan yang dapat menimbulkan sudut pandang negative terhadap pembangunan jembatan yang belum selesai hingga sekarang, hal ini seharusnya Pemerintah dapat lebih serius lagi dan maksimal dalam mengelola pembangunan.
2. Sehubungan masih adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan jembatan Mahkota II diharapkan Pemerintah dapat membenahi sarana transportasi air dengan memperhatikan Dermaga,

kualitas perahu dan keselamatan perjalanan bagi pengguna transportasi air karena tidak semua masyarakat akan menggunakan jembatan, jadi dengan adanya fasilitas pelabuhan yang baik maka masyarakat akan lebih nyaman karena transportasi air memiliki konsumen tersendiri, mengenai dampak pada pencemaran udara dan kebisingan pemerintah dapat untuk menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, penanaman pohon di sekitar lokasi kegiatan dan pembatasan penggunaan bahan bakar fosil dalam kegiatan proyek, terkait dengan kebisingan mungkin lebih kepada pembatasan jam kerja terus menggunakan alat yang bisa meredamkan suara pada saat kegiatan berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Afrizal 2007 *The Community, Business and the state*. Tentang Dampak Pembangunan, Bogor.
- B, Milles, Mathew dan Huberman, 1992. *Analisis Data Deskriptif Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bapedal. *Himpunan tentang Peraturan analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Buku IV. Jakarta 2001.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Islamy, M. Irfan. 2008. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung : Mandar Maju.
- Menurut Bintoro Tjorkroamidjojo 2002 , Todaro2000, Tentang pembangunan, jakarta.
- Moleong, lexy.J, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi, Advokasi teori dan praktek)*. Surabaya : PMN.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Shadily, Hasan. 1995. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Sugihartono, jalaludin rahmat 2007. *Persepsi. Kamus besar indonesia*. Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Soenarko, 2005. *Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Winanarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Buku Kita.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Waralah Cristo, 2008, Hikmah Arif, 2009 . *Pengertian Tentang dampak*, Jakarta Bandung Alfabeta.

Dokumen – Dokumen

- _____ ,Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 596/267/HUK-KS/2002.
- _____ ,Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 968/524/VIII/2012.
- _____ Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peaturan Pemerintah No 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
-